

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

INTISARI

Hannah Yohanda¹ Dani Krisnawati²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini juga untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris karena penelitian ini memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yakni dengan mengkaji data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan, bahan hukum sekunder berupa hasil karya para ahli hukum dalam bentuk buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa indonesia. Data primer diperoleh dari lapangan berdasarkan penemuan dan pengamatan penulis berupa hasil wawancara dengan narasumber dan data hasil kuesioner oleh responden. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu, dalam hal prosedur maupun sanksi pемidanaannya, antara anak dengan dewasa masih disamakan, meskipun sudah ada peraturan khusus yakni Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, perkara pelanggaran lalu lintas yang berakibat kecelakaan lalu lintas oleh anak, maka proses peradilan bagi anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas haruslah diberlakukan proses diversi, namun aparat penegak hukum masih belum memahami batas usia diberlakukannya diversi sesuai dengan UU SPPA.

Kata Kunci : *Pelanggaran Lalu Lintas, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak*

¹ Mahasiswa Strata 1 (S-1) pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

LEGAL ENFORCEMENT FOR CHILDREN AS AN OFFENDER OF CRIMINAL ACTS OF TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT

ABSTRACT

Hannah Yohanda³ Dani Krisnawati⁴

This study aims to examine the criminal justice process for children as an offender of criminal acts of traffic and road transport.. This research is also to trace and reveal about criminal liability in cases of criminal acts of traffic and road transport committed by children.

The research method used is juridical normative and juridical empirical research because this research combine between library research and field research that is by examining secondary data and primary data. Secondary data used was acquired from the primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of the work of legal experts in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and Indonesian dictionary. Primary data obtained from the field based on the discovery observation of the author in the form of interviews between the author and questionnaire from the respondent. The data analysis in this research was done qualitatively and quantitatively.

The result of the research shows that: Firstly, the court process of certain traffic violation cases, in terms of procedure and punishment of punishment, between children and adults is still equated, although there is a special regulation that is Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System. Secondly, the case of traffic violations resulting in traffic accidents by children, then the judicial process for children as perpetrators of traffic accidents adversely affecting others must be applied to the process of diversion, but law enforcement officers still do not understand the age limit of enactment of the diversi in accordance with the Juvenile Justice System Act.

Keywords : Criminal Acts, Traffic and Road Transport, Children, Juvenile Justice System

³ Undergraduate Student of Criminal Law Department in Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Lecturer of Law Faculty of Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta